

Komisi II Minta Pemkot Maksimalkan Pendapatan Daerah dari BUMD

BOGOR (IM)- Komisi II DPRD Kota Bogor memulai pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja pada Selasa 8 Agustus 2023 sore. Dengan kondisi keuangan daerah yang masih minus, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan meminta Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah dari deviden yang diberikan oleh BUMD yang ada.

"Ya, bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP, agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal," ungkap Anita dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/8) pagi.

Anita menjelaskan, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda ini dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. "Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa semua Perumda akan maju," terang politisi partai Demokrat ini.

Anita juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak,

terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHITB.

"Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkoordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak," tegas Anita.

Anita meminta kepada seluruh SKPD Kota Bogor untuk terus saling berkomunikasi dan bersinergi agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal. Sebab jika melihat KUA-PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, untuk 2024 Pemkot Bogor harus berpedoman kepada sektor pembangunan berkelanjutan yaitu peningkatan ekonomi, membangun sosial budaya masyarakat dan memperhatikan agar tidak merusak lingkungan.

"Dinas dan lembaga seharusnya selalu saling berkoordinasi dan bersinergi dalam berbagai hal agar secara aturan tetap aman, secara pelayanan juga tetap baik dan meningkat. Pemakaian anggaran benar-benar tepat sasaran dalam membangun masyarakat dan Kota Bogor agar sejalan dengan pendapatan," pungkasnya. ● jay

Dinas PUPR Potong Kabel Optik Pemicu Banjir di Jalan Sholis Bogor

BOGOR (IM)- Dinas PUPR Kota Bogor menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banjir yang kerap terjadi di Jl Sholeh Iskandar sekitar Cimanggung, Tanah Sareal Kota Bogor. Berdasarkan hasil pengecekan, banjir ternyata disebabkan banyaknya kabel optik di dalam saluran air.

"Kita sama teman-teman APJATEL (Asosiasi Perusahaan Jasa Telekomunikasi) Kota Bogor melakukan pengecekan di ruas Jl Sholis, tepatnya di depan Jogia Junction itu kan ada pengaduan banjir di saluran air, jadi selalu banjir kalau hujan di titik itu, kita cek bersama untuk tahu penyebabnya. Pas dicek ternyata saluran air isinya kabel optik semua," kata Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina, Rabu (9/8).

Rena mengungkap, kabel-kabel tersebut seharusnya ditanam sehingga tidak meng-

ganggu saluran air. Kabel-kabel tersebut kemudian dipotong. "Harusnya kabel-kabel itu ditanam (sistem ducting), yang ada ini kan mereka ntip di saluran air, jadi kabel itu numpang di saluran air. Disaksikan oleh Apjatel, ada dari provider dan pihak jalan nasional, kita potong itu kabel-kabel yang mengganggu dan jadi pemicu banjir," kata Rena.

Rena menyebutkan, pihak provider yang menyimpan kabel di saluran air hingga memicu banjir, bersepakat memindahkan kabel dan menanamnya di titik yang aman. "Mereka (provider pemilik kabel) sepakat, mereka akan ducting. Tapi tidak semua, untuk sementara hanya di titik banjir yang menyebabkan masalah. Itu yang akan kita prioritaskan dulu. Kita sudah bersepakat dan bersepaham untuk ducting sepanjang 500 meter dari Jogia Junctionnya," kata Rena. ● gio

IDN/ANTARA



MURAL BERTEMA PROKLAMATOR KEMERDEKAAN RI

Seniman melukis mural dengan tema Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno-Hatta di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/8). Pembuatan mural dengan dana sukarela warga setempat tersebut selain dalam rangka menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota Linmas Desa di Pandeglang Dilatih Penanggulangan Bencana

PANDEGLANG (IM)-Puluhan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Pandeglang, dilatih penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang.

Pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para anggota Linmas desa dalam pencegahan, penanganan dan mitigasi bencana. "Guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dan mitigasi bencana bagi para anggota Linmas. Maka kami lakukan pelatihan kepada para Linmas desa ini," ungkap Atang Suhana, Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang, Rabu (9/8).

Dalam pelatihan ini kata Atang, para anggota Linmas diberikan pelatihan bagaimana cara penanggulangan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya.

"Intinya kesiapsiagaan ini perlu, karena bencana datang tidak bisa diprediksi. Kapan pun dan di mana pun bisa terjadi," katanya.

Menurutnya, saat ini kan sedang ada fenomena El-Nino yang berdampak para kekeringan, nah di musim kering ini potensi bencana kebakaran lumayan tinggi. Selain itu, juga daerah Pandeglang ini sangat dekat dengan garis pantai.

Untuk itu lanjut Atang, kesiapsiagaan dalam pencegahan dan mitigasi bencana perlu dilakukan, dan pemahaman tentang penanggulangan bencana perlu diketahui oleh semua kalangan termasuk para anggota Linmas desa ini. "Mudah-mudahan bencana tidak terjadi di kita, meski demikian kesiapsiagaan itu. Supaya ketika bencana itu datang, resiko bencana dapat diminimalisir," ujarnya. ● pra

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

INFRASTRUKTUR JALUR LINTAS SELATAN JAWA

Foto udara Jalur Pantai Selatan di Kawasan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (9/8). Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan di Banten dan Jawa Barat telah terealisasi dan selesai 100 persen aspal guna memperlancar distribusi logistik antardaerah, sehingga akan meningkatkan daya saing perekonomian.

1,2 Juta Pasutri di Bogor Nikah Siri, Pemkab Gencarkan Program Isbat Nikah

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan Sidang Isbat Nikah untuk sebanyak 2.500 pasutri. "Sejauh ini, sudah sekitar 600 pasangan suami istri mengikuti Isbat Nikah," ujar Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin.

CIBINONG (IM)-Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebut masih ada sekitar 1,2 juta pasangan suami istri di daerah itu yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat oleh negara alias nikah siri.

"Data dari Badan Pusat

Statistik, dari sekitar 2,6 juta pasangan menikah, baru sekitar 1,4 juta pasangan memiliki buku nikah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Bogor, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat Pemer-

intah Kabupaten Bogor menggenapkan program isbat nikah.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan Sidang Isbat Nikah untuk sebanyak 2.500 pasutri. "Sejauh ini, sudah sekitar 600 pasangan suami istri mengikuti Isbat Nikah," ujarnya.

Burhan menjelaskan, pernikahan yang tercatat oleh negara akan menguntungkan pihak perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan hukum serta hak, jika terjadi perceraian atau hal lainnya.

"Salah satunya dengan program isbat nikah ter-

padu, memfasilitasi masyarakat mendapatkan identitas hukum berupa akta nikah. Saya minta agar sekaligus didorong percepatan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran dan KIA," kata Burhan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, Nurhayati menerangkan, kegiatan sidang isbat nikah diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

"Hasil yang diharapkan dari kegiatan isbat nikah ter-

padu ini, yakni dapat memfasilitasi pasangan suami istri yang kurang mampu untuk memperoleh buku nikah secara sah, mewujudkan tertib administrasi kependudukan, serta mendukung program ketahanan keluarga," ujar Nurhayati.

Nurhayati menambahkan, program isbat nikah melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. "Jadi setelah mengikuti kegiatan isbat nikah sudah memiliki buku nikah, dan anaknya memiliki akta kelahiran serta KIA," katanya. ● gio

RSUD Ciawi Kembangkan Inovasi Pelayanan

BOGOR (IM)- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi terus kembangkan inovasi pelayanan, seperti Bogor Pain Center (BPC), Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), pengembangan layanan hemodialisa, dan layanan lainnya.

Hal ini diungkapkan Direktur RSUD Ciawi, dr. Fusia Meidiawaty kepada Tim Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (7/8).

Tak hanya sampai di situ, menurut dr. Fusia Meidiawaty, ke depan RSUD Ciawi akan mengembangkan diri menjadi rumah sakit umum daerah berbasis digital dengan mengembangkan berapa aplikasi online.

"RSUD Ciawi sebagai salah satu dari rumah sakit daerah di Kabupaten Bogor saat ini memiliki layanan unggulan seperti Bogor

Pain Center (BPC), kemudian Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) dan pengembangan dari hemodialisa," ungkap dr. Fusia.

Fusia menuturkan, ke depan RSUD Ciawi akan menjadi rumah sakit berbasis digital, dengan mengembangkan beberapa aplikasi online. Salah satu tujuannya adalah, nantinya pasien sudah tidak lagi berdesakan untuk mendaftar. Dan tentunya mempermudah pasien dalam mengakses layanan.

"Segala sesuatunya akan kami kembangkan secara online, mulai dari pendaftaran, termasuk pengembangan elektronik medical record, sehingga pelayanan kepada pasien sudah paperless," ujar dr. Fusia.

Ia menambahkan, RSUD Ciawi, terus berkembang dan bergerak sesuai dengan visi misinya, yakni menjadi "Rumah Sakit Terpercaya

Pilihan Masyarakat", dengan motto "Selalu Melayani dengan Hati dan Senyum".

Untuk diketahui, layanan unggulan RSUD Ciawi seperti Bogor Pain Center dan Pelayanan Jantung Terpadu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pasien bisa mengakses layanan tersebut dengan menggunakan BPJS. Layanan ini pun mendapatkan respon positif dari publik.

Salah satunya, inovasi layanan Bogor Pain Center diakui sebagai layanan dalam bentuk instalasi rumah sakit pertama di Indonesia yang memberikan layanan multidisiplin dalam penanganan nyeri.

Bogor Pain Center mampu membawa Kabupaten Bogor meraih Innovative Government Award (IGA) tahun 2021 dan 2022. Hal ini juga menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia. ● gio



IST

RSUD Ciawi sebagai salah satu dari rumah sakit daerah di Kabupaten Bogor saat ini memiliki layanan unggulan seperti Bogor Pain Center (BPC), kemudian Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) dan pengembangan dari hemodialisa.

RUGIKAN NEGARA RP2 MILIAR LEBIH

Kanwil DJP Banten Bongkar Kasus Mafia Pajak

SERANG (IM)-Penyidik Kanwil DJP Banten membongkar kasus mafia pajak yang merugikan keuangan negara Rp2 miliar lebih. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten, Moch Solikhun

mengatakan, kedua tersangka tersebut berinisial REB dan JM alias I. Keduanya diduga telah membantu TS dalam menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan kegiatan atau transaksi yang sebenarnya atau fiktif melalui PT BPS.

"TS ini pernah divonis pidana selama dua tahun (dalam kasus perpajakan)," ujar Solikhun, Rabu (9/8).

Solikhun menjelaskan, kejahatan yang dilakukan kedua tersangka menyediakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada PT BPS. Faktur Pajak tersebut kemudian dikreditkan oleh PT BPS sehingga pajak yang dibayar oleh PT BPS menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

"Modus yang dilakukan JM dan REB adalah dengan menyediakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," kata Solikhun.

Solikhun mengatakan, tindakan kedua tersangka tersebut di-

lakukan dalam kurun Januari 2015 sampai dengan Desember 2016. Akibat tindakan keduanya negara mengalami kerugian miliaran rupiah.

"Atas perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.076.826.807," ujar Solikhun.

Akibat perbuatan kedua tersangka dijerat Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021.

"REB dan JM di ancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak," kata Solikhun.

Solikhun menambahkan, berkat kerjasama antara penegak hukum Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten, berkas perkara atas tersangka REB dan JM sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti Kejati Banten. "Perkara tersebut juga telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan kemarin," tutur Solikhun. ● pra